

Strategi Implementasi Kebijakan Dalam Meningkatkan Literasi Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Ahmad Fathoni¹, Taufik Arbain², Asmui³

^{1,2,3} Universitas Lambung Mangkurat

Korespondensi penulis: tonibarabai@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze policy implementation strategies for improving community literacy in Hulu Sungai Tengah Regency and to identify the factors that support and hinder their implementation. This study employs a qualitative approach using a descriptive research design. The study was conducted in Hulu Sungai Tengah Regency, South Kalimantan Province, focusing on the Hulu Sungai Tengah Regency Library and Archives Office as well as various educational institutions and communities involved in the implementation of literacy programs. Research informants included local government officials, school librarians, library managers, reading ambassadors, and other literacy practitioners. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The data were then analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions to obtain a comprehensive picture of the implementation of literacy policies in Hulu Sungai Tengah Regency. Research findings indicate that policy implementation strategies to improve community literacy in Hulu Sungai Tengah Regency are carried out through the development of school and village libraries, capacity building for librarians, the acquisition of collections and the expansion of library services, literacy outreach and education, social inclusion-based literacy activities, and the strengthening of the role of reading ambassadors and literacy competitions. The implementation of these policies is supported by the commitment of the local government, the involvement of schools and literacy communities, human resource capacity building, and various innovative literacy programs. The constraints still faced include limited human resources, budget constraints, inadequate facilities and infrastructure, low public interest in reading, and unequal access to literacy services. Based on the research findings, it can be concluded that the implementation of literacy policies in Hulu Sungai Tengah Regency has proceeded quite well and has had a positive impact on increasing community literacy activities. However, it is still necessary to strengthen resources, ensure equitable service distribution, and ensure program sustainability so that the goal of improving community literacy can be achieved more optimally.*

Keywords: *Policy Implementation, Community Literacy, Literacy Strategies, Regional Library, Hulu Sungai Tengah.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi implementasi kebijakan dalam meningkatkan literasi masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan fokus pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta berbagai lembaga pendidikan dan komunitas yang terlibat dalam pelaksanaan program literasi. Informan penelitian terdiri atas unsur pemerintah daerah, pustakawan sekolah, pengelola perpustakaan, duta baca, dan pelaku literasi lainnya. Data diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya data dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan literasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi implementasi kebijakan dalam meningkatkan literasi masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dilaksanakan melalui pembinaan perpustakaan sekolah dan desa, peningkatan kapasitas pustakawan, pengadaan koleksi dan pengembangan layanan perpustakaan, sosialisasi dan edukasi literasi, kegiatan literasi berbasis inklusi sosial, serta penguatan peran duta baca dan kegiatan lomba literasi. Implementasi kebijakan tersebut didukung oleh komitmen pemerintah daerah, keterlibatan sekolah dan komunitas literasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta berbagai program literasi yang inovatif. Adapun faktor penghambat yang masih dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana yang belum memadai, rendahnya minat baca masyarakat, serta belum meratanya akses layanan literasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan literasi di Kabupaten Hulu

Sungai Tengah telah berjalan cukup baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan aktivitas literasi masyarakat. Namun demikian, masih diperlukan penguatan sumber daya, pemerataan layanan, serta keberlanjutan program agar tujuan peningkatan literasi masyarakat dapat tercapai secara lebih optimal.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Literasi Masyarakat, Strategi Literasi, Perpustakaan Daerah, Hulu Sungai Tengah.

1. LATAR BELAKANG

Penelitian ini beranjak dari adanya kesenjangan harapan pelayanan perpustakaan daerah untuk meningkatkan literasi masyarakat dengan kenyataan masih kurangnya kemampuan masyarakat Hulu Sungai Tengah dalam memahami dan merespons kebijakan. Padahal Pemerintah menegaskan pentingnya literasi melalui penguatan peran pendidikan dan perpustakaan sebagai sarana pembelajar Masyarakat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014.

Dalam ranah administrasi publik, pemerintah menjadikan kebijakan publik sebagai sarana pokok untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat dan mengarahkan proses pemajuan daerah (Anderson, 2015). Pandangan ini menegaskan bahwa penyusunan menjadi tahapan awal sebelum kebijakan memasuki fase pelaksanaan. Berbagai kebijakan publik telah dirumuskan secara formal, namun belum tentu memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan dalam praktik pemerintahan (Wahab, 2016). Kondisi tersebut mencerminkan belum selarasnya rancangan kebijakan dengan kenyataan yang terjadi pelaksanaannya. Proses pengejawantahan dalam praktik menjadi bagian penting yang menentukan bagaimana kebijakan dijalankan oleh aktor-aktor pelaksana (Hill & Hupe, 2021).

Literasi masyarakat menjadi isu strategis dalam kebijakan publik karena berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam memahami dan merespons kebijakan. Pemerintah menegaskan pentingnya literasi melalui penguatan peran pendidikan dan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, 2014). Keberadaan regulasi tersebut menegaskan bahwa pengembangan literasi tidak terbatas pada lingkungan pendidikan formal, melainkan juga menjadi bagian dari sektor lainnya dari pelayanan publik. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menekankan bahwa literasi masyarakat berperan dalam membangun masyarakat pembelajar sepanjang hayat (Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2021).

Pelaksanaan kebijakan literasi memerlukan strategi kebijakan yang mampu mengarahkan tindakan pemerintah secara terencana. Strategi kebijakan dipahami sebagai pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan melalui penentuan sasaran dan prioritas (Bryson, 2018). Strategi berperan dalam menghubungkan tujuan kebijakan dengan tindakan operasional. Kebijakan ketiadaan strategi yang terarah berpotensi menghambat proses pelaksanaannya (Nugroho, 2017).

Aktualisasi ketentuan dalam tataran operasional tidak terlepas dari pengaruh tata kelola pemerintahan yang dijalankan oleh institusi publik. Penyelenggaraan administrasi publik yang berkualitas mensyaratkan keterbukaan informasi, pertanggungjawaban kinerja, serta koordinasi pada tataran operasional kebijakan publik (Sedarmayanti, 2017). Sejumlah asas tersebut ditempatkan sebagai landasan normatif yang mengarahkan dalam pengelolaan kebijakan supaya realisasi kegiatannya tidak menyimpang dari sasaran yang telah dirancang sejak awal. Adapun dalam perspektif governance, lahirnya suatu keputusan pemerintahan tidak terlepas dari hubungan timbal balik antarpihak yang berada

dalam tatanan pemerintahan (Pierre, 2020).

Penelitian terkait dengan literasi, baik strategi maupun implementasi kebijakan telah memperoleh perhatian cukup luas melalui beragam telaah ilmiah yang disusun oleh sejumlah akademisi terdahulu. Penelitian oleh Rodiyah dan Bolanitan (2024) menekankan pada aspek peningkatan kompetensi aparatur pada lingkup pemerintahan desa dalam mengoperasikan sekaligus mendayagunakan teknologi informasi guna mendukung derajat keberhasilan pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) pada tataran operasional, dengan fokus pada pengukuran kapasitas kompetensi digital dan pelayanan publik berbasis teknologi. Penelitian Idrus dkk. (2025) menekankan pada aspek peran kebijakan publik dalam meningkatkan literasi digital masyarakat pedesaan melalui penyediaan pelatihan, infrastruktur, serta kolaborasi pemerintah dan komunitas lokal. Sementara itu, penelitian Suharyani dan Tamba (2017) lebih menekankan pada aspek evaluasi program Kampung Literasi melalui pendekatan evaluatif terhadap sarana, proses pelaksanaan, dan hasil peningkatan minat baca masyarakat. Pada penelitian saat ini penulis lebih melihat aspek strategi kebijakan dan implementasi kebijakan peningkatan literasi masyarakat secara kelembagaan dalam perspektif administrasi publik, dengan fokus pada perumusan strategi, koordinasi antar-perangkat daerah, tata kelola pemerintahan, serta peran stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan literasi di tingkat daerah, dimana perbedaan terletak pada analisis kebijakan yang bersifat sistemik dan struktural, bukan hanya pada evaluasi program atau peningkatan kapasitas teknis semata, sehingga hal ini menjadi kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Implementasi

Pendekatan implementasi kebijakan berkembang seiring dengan kompleksitas permasalahan publik. Pendekatan klasik cenderung bersifat *top-down* dengan menekankan kepatuhan terhadap tujuan kebijakan, sedangkan pendekatan modern lebih menekankan interaksi dan pembelajaran antar-aktor. Grindle (2017) menempatkan keselarasan antara muatan keputusan dan karakter kondisi penerapannya sebagai unsur krusial bagi tercapainya hasil operasionalisasi secara optimal implementasinya. Pendekatan ini menegaskan pentingnya memahami kondisi kelembagaan dan lingkungan dalam proses implementasi kebijakan.

Teori implementasi memberikan landasan konseptual untuk memahami bagaimana kebijakan publik diwujudkan dalam praktik pemerintahan. Implementasi kebijakan merupakan proses kompleks yang melibatkan fungsi administratif, faktor struktural, aktor pelaksana, serta pendekatan pelaksanaan yang beragam. Pemahaman terhadap teori dalam penelaahan tata kelola urusan kenegaraan, operasionalisasi keputusan memperoleh perhatian khusus karena kedudukannya yang menentukan untuk menjelaskan dinamika pelaksanaan instrumen pengaturan sekaligus mencermati sejumlah determinan yang membentuk ketercapaian sasaran dari keputusan penyelenggara negara mengenai kepentingan kolektif warga.

Teori Strategi

Strategi pada dasarnya merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana suatu organisasi menentukan arah, tujuan, dan cara bertindak untuk mencapai hasil yang diinginkan. Bryson (2018) mendefinisikan strategi sebagai pola keputusan dan tindakan fundamental yang membentuk serta memandu arah organisasi dalam jangka panjang. Johnson, Scholes, dan Whittington (2017) memandang strategi sebagai penentuan arah organisasi dan pengelolaan sumber daya untuk mencapai keunggulan dalam lingkungan yang berubah. Menurut Stead dan Stead (2019), strategi merupakan kerangka terpadu

yang menghubungkan tujuan organisasi dengan lingkungan internal dan eksternal. Sementara itu, Elbanna, Andrews, dan Pollanen (2016) menjelaskan bahwa strategi mencerminkan pilihan sadar organisasi dalam merespons peluang dan tantangan lingkungan secara sistematis.

Dalam perkembangannya, teori strategi juga menekankan pentingnya pendekatan analitis dan partisipatif dalam perumusan strategi. Strategi tidak hanya dirancang oleh pimpinan puncak, tetapi juga melibatkan berbagai aktor organisasi melalui proses yang deliberatif. Studi yang dilakukan oleh Cepiku, Ferlie, dan Sicilia (2020) menekankan bahwa pendekatan kolaboratif dalam strategi meningkatkan legitimasi dan kualitas keputusan strategis. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran strategi modern dari model top-down menuju proses yang lebih inklusif.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan Kajian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif dengan corak deskriptif-analitis. Sumber informasi yang dijadikan pijakan dalam kajian ini terbagi ke dalam dua kelompok, yakni Data primer yang dihimpun peneliti secara langsung dari pihak yang menjadi sumber utama di lokasi kajian, serta data sekunder yang bersumber dari berbagai dokumen resmi pemerintah, peraturan perundang-undangan, laporan kebijakan, data statistik, maupun rujukan dari kajian-kajian sebelumnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Mengacu pada Miles, Huberman, dan Saldana (2014), rangkaian analisis yang digunakan pada penelitian ini mencakup tiga kegiatan pokok, yakni pemadatan data, penampilan data, serta perumusan simpulan yang disertai dengan pemeriksaan atau verifikasi temuan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Analisis Strategi Implementasi Kebijakan dalam Meningkatkan Literasi Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Merujuk pada temuan lapangan yang telah dihimpun, pengoperasian agenda kebijakan literasi pada wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah diwujudkan melalui rangkaian kegiatan yang dirancang secara terarah dan dipertahankan keberlangsungannya. Pola tersebut tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan fasilitas penunjang, tetapi turut diarahkan pada pengembangan kapabilitas tenaga pelaksana serta peningkatan partisipasi masyarakat. Strategi tersebut operasionalisasi agenda tersebut kemudian dituangkan ke dalam sejumlah bentuk aktivitas pokok yang saling melengkapi, meliputi pembinaan perpustakaan sekolah dan desa, peningkatan kapasitas pustakawan, pengadaan koleksi dan pengembangan layanan perpustakaan, sosialisasi dan edukasi literasi, kegiatan literasi berbasis inklusi sosial, serta penguatan peran duta baca dan penyelenggaraan lomba literasi.

Dalam pelaksanaannya, pembinaan perpustakaan dilakukan secara aktif dengan mengandalkan rangkaian proses penguatan yang mencakup pendampingan secara berkesinambungan, pembekalan melalui bimbingan teknis, serta monitoring yang melibatkan dinas perpustakaan, sekolah, dan komunitas literasi. Pembinaan ini tidak berhenti pada pemenuhan urusan tata kelola kelembagaan semata, melainkan turut diarahkan untuk memperkuat penguatan fungsi perpustakaan sebagai pusat pembelajaran. Gambaran tersebut dapat ditelusuri melalui serangkaian langkah nyata yang ditempuh untuk menjadikan perpustakaan sebagai menempati posisi yang menyatu dengan rangkaian proses pembelajaran yang berlangsung dalam lingkungan pendidikan formal, termasuk melalui integrasi dengan kurikulum dan program literasi rutin.

Strategi penguatan kompetensi tenaga pengelola perpustakaan ditempuh melalui

sejumlah agenda pengembangan profesional, antara lain penyelenggaraan pelatihan, lokakarya, serta kegiatan kelompok kerja pustakawan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pustakawan, baik dalam pengelolaan perpustakaan secara konvensional maupun dalam pemanfaatan teknologi digital. Peningkatan kapasitas ini memberikan pengaruh konstruktif terhadap pembenahan mutu penyelenggaraan layanan, yang kemudian diwujudkan melalui pola pelayanan yang lebih komunikatif, kreatif, dan variatif, termasuk penerapan teknik pembacaan ekspresif secara lantang (*read aloud*) serta kegiatan literasi kreatif.

Dari aspek layanan, strategi implementasi juga dilakukan melalui pengadaan koleksi dan pengembangan layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Pengembangan ini tidak hanya mencakup koleksi buku fisik, tetapi juga mulai diarahkan pada layanan digital, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam akses dan fasilitas. Selain itu, inovasi layanan seperti pojok literasi tematik dan kegiatan berbasis kreativitas turut mendukung peningkatan minat baca.

Strategi lainnya adalah pelaksanaan sosialisasi dan edukasi literasi yang dilakukan melalui perpaduan sejumlah metode penyebaran informasi, baik dengan membangun interaksi tatap muka maupun mengoptimalkan kanal komunikasi berbasis teknologi. Sasaran penyampaian informasi tersebut diperluas hingga mencakup peserta didik, tenaga pendidik, pihak keluarga, serta masyarakat umum. Pendekatan yang digunakan cenderung sederhana dan bersifat praktis dan kontekstual, sehingga materi yang disampaikan lebih mudah dicerna serta memiliki keterhubungan langsung dengan berbagai kebutuhan dan aktivitas warga dalam keseharian.

Selain itu, kegiatan literasi berbasis inklusi sosial berkedudukan sebagai salah satu instrumen strategis untuk memperkuat kecakapan literasi warga. Rangkaian aktivitas tersebut meliputi kebiasaan membaca bersama, mendongeng, pelatihan keterampilan, hingga pameran hasil karya. Perspektif tersebut memperlihatkan bahwa kecakapan literasi tidak selayaknya dipersempit hanya pada kegiatan berhadapan dengan bahan bacaan, melainkan dipahami pula sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi individu.

Peran duta baca serta kegiatan lomba dan penghargaan literasi juga menjadi bagian dari strategi implementasi kebijakan. Duta baca berfungsi sebagai motivator dan role model dalam mendorong budaya membaca, sedangkan kegiatan lomba dan penghargaan mampu meningkatkan antusiasme serta partisipasi masyarakat, khususnya siswa.

Secara keseluruhan, strategi implementasi kebijakan literasi dalam lingkup administratif Kabupaten Hulu Sungai Tengah memperlihatkan penerapan pola yang bersifat komprehensif dan kolaboratif, dengan melibatkan berbagai pihak serta mengintegrasikan berbagai bentuk kegiatan literasi. Strategi ini tidak semata-mata diarahkan untuk mengejar penyediaan sarana, melainkan turut tercermin melalui pergeseran pola tindakan warga serta tumbuhnya pemahaman yang semakin kuat mengenai pentingnya literasi dalam kehidupan sosial. terhadap pentingnya literasi.

Temuan temuan tersebut memiliki keterkaitan dengan kerangka pemikiran mengenai perumusan strategi menurut Bryson (2018) yang menyatakan bahwa strategi merupakan pola tindakan yang dirancang secara sistematis guna merealisasikan sasaran kelembagaan dengan menyesuaikan langkah yang ditempuh terhadap dinamika yang muncul dari lingkungan internal maupun eksternal. Pola penguatan literasi yang diterapkan memperlihatkan perpaduan antara mekanisme kelembagaan melalui agenda pemerintah dengan pendekatan sosial melalui partisipasi masyarakat.

Selain itu, strategi implementasi kebijakan ini juga mencerminkan pendekatan

pendekatan *top-down*, yakni pola perumusan ketetapan yang titik awal pengarahannya berasal dari otoritas pada tingkat pemerintahan yang memiliki kedudukan lebih tinggi dan kemudian diteruskan kepada pemerintah daerah dan diimplementasikan melalui berbagai unit pelaksana pada tataran operasional. Kondisi tersebut memiliki keterkaitan dengan perspektif Mazmanian dan Sabatier (1983) yang menempatkan ketegasan arah sasaran suatu ketetapan sebagai salah satu unsur penting, disertai dengan pengendalian administratif dalam proses implementasi.

Dari perspektif implementasi kebijakan, strategi yang ditemukan juga menunjukkan kesesuaian dengan model kerangka pemikiran Edward III yang menempatkan empat ranah penentu dalam proses pelaksanaan ketetapan, meliputi penyampaian informasi, kapasitas pendukung, kecenderungan sikap pihak pelaksana, serta tata kelembagaan birokrasi. Praktik penyebarluasan agenda literasi memperlihatkan pentingnya komunikasi kebijakan, pelatihan pustakawan mencerminkan penguatan sumber daya, keterlibatan berbagai pihak menunjukkan disposisi pelaksana yang mendukung, dan koordinasi antar lembaga menunjukkan peran struktur birokrasi.

Bukti empiris yang diperoleh turut memperlihatkan kesesuaian dengan sejumlah kajian sebelumnya yang mengungkapkan bahwa pencapaian agenda literasi berkaitan erat dengan keterpaduan program yang dirancang pemerintah, penguatan kapabilitas tenaga pelaksana, serta pembentukan jejaring kerja bersama masyarakat. Keterlibatan lintas unsur dalam penyelenggaraan kegiatan literasi pada berbagai temuan terdahulu juga memperlihatkan kecenderungan mampu memperluas keikutsertaan warga sekaligus menumbuhkan ketertarikan baca secara signifikan.

Bertolak dari keseluruhan hasil penelaahan, dapat ditegaskan bahwa pola operasionalisasi ketetapan yang diterapkan literasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah direalisasikan melalui rangkaian langkah yang tersusun secara terarah dan memiliki pola pelaksanaan yang jelas serta menyeluruh melalui berbagai program yang saling terintegrasi. Strategi tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menggabungkan pendekatan struktural dan partisipatif dalam meningkatkan literasi masyarakat.

Secara keseluruhan, pelaksanaan agenda penguatan kecakapan literasi pada wilayah administratif Kabupaten Hulu Sungai Tengah memperlihatkan capaian yang relatif positif dan telah bergerak menuju tingkat keterwujudan yang cukup memadai, meskipun belum sepenuhnya optimal. Efektivitas gambaran mengenai pencapaian tersebut dapat ditelusuri melalui sejumlah tolok ukur pokok yang digunakan sebagai dasar penilaian, antara lain meningkatnya minat baca, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan literasi, membaiknya kualitas layanan perpustakaan, serta meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya literasi.

Pertama, dari aspek minat baca, hasil penelitian menunjukkan adanya perubahan positif, terutama pada kalangan siswa. Berbagai program literasi yang direalisasikan secara berkala melalui beragam bentuk pembiasaan, antara lain aktivitas membaca secara kolektif serta penerapan kebiasaan menelaah bahan bacaan sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, serta kegiatan presentasi isi buku, mampu mendorong siswa untuk lebih aktif membaca. Selain itu, adanya kegiatan kreatif seperti lomba literasi, menulis, bercerita, dan kegiatan ekspresi lainnya turut memperkuat minat baca karena memberikan ruang bagi siswa untuk mengaktualisasikan hasil bacaan mereka.

Kedua, dari aspek partisipasi, implementasi kebijakan literasi menunjukkan adanya peningkatan keterlibatan masyarakat, baik dari pihak sekolah, guru, pustakawan, maupun komunitas literasi. Program literasi berbasis inklusi sosial seperti membaca bersama, mendongeng, pelatihan keterampilan, serta kegiatan berbasis praktik telah berhasil

menarik partisipasi masyarakat. Kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa pengembangan kecakapan literasi tidak semata diarahkan pada kebiasaan membaca, tetapi turut diperluas melalui rangkaian aktivitas yang kontekstual dan aplikatif, lebih efektif dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat.

Ketiga, dari aspek kualitas layanan perpustakaan, hasil penelitian memperlihatkan perkembangan yang relatif menonjol dibandingkan kondisi sebelumnya. Tenaga pengelola perpustakaan yang sebelumnya telah mengikuti pelatihan dan kegiatan peningkatan kapasitas mampu memberikan layanan yang lebih inovatif dan interaktif. Misalnya, penggunaan metode membaca nyaring (*read aloud*), pengembangan pojok literasi, serta kegiatan kunjungan bergilir per kelas. Selain itu, pengelolaan perpustakaan juga menjadi lebih terstruktur, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam aspek digitalisasi dan fasilitas.

Keempat, dari aspek pemahaman mengenai keterlibatan warga dalam pengembangan kecakapan literasi, bukti lapangan memperlihatkan bahwa kelompok masyarakat mulai memahami pentingnya kecakapan literasi, yang cakupannya melampaui penguasaan baca-tulis semata, melainkan turut mencerminkan kapasitas seseorang dalam menangkap makna informasi serta membedakan fakta dengan opini. Sosialisasi literasi yang dilakukan melalui berbagai media dan kegiatan edukatif berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran tersebut.

Namun demikian, efektivitas implementasi kebijakan literasi ini belum merata. Beberapa wilayah masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan perpustakaan, khususnya pada kawasan yang memiliki jarak relatif jauh dari titik utama penyediaan layanan. Di luar kondisi tersebut, keterbatasan fasilitas seperti kurangnya perangkat teknologi, koleksi buku yang belum mutakhir, serta keterbatasan sumber daya manusiainforman juga memengaruhi kualitas pelaksanaan program. Di sisi lain, minat baca masyarakat secara umum masih perlu ditingkatkan, sehingga program literasi memerlukan pendekatan yang mampu mempertahankan keberlangsungannya dalam jangka panjang sekaligus memiliki keluwesan untuk menyesuaikan pelaksanaannya dengan dinamika kehidupan sosial warga.

Temuan ini sejalan dengan konsep efektivitas kebijakan publik yang mengemukakan bahwa ukuran keberhasilan suatu ketetapan dapat dilihat dari sejauh mana sasaran yang telah dirancang sebelumnya benar-benar dapat diwujudkan (Dunn, 2018). Berangkat dari pemahaman tersebut, kebijakan literasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah menunjukkan capaian dalam meningkatkan minat baca dan partisipasi masyarakat, meskipun belum sepenuhnya merata.

Temuan empiris dalam kajian ini turut memiliki keterkaitan dengan perspektif literasi yang dirumuskan UNESCO (2017), yang memandang kecakapan literasi sebagai kapasitas yang bersifat multidimensi. Dalam pemahaman tersebut, literasi tidak berhenti pada penguasaan aktivitas membaca dan menulis, tetapi mencakup kemampuan individu dalam menangkap makna, menelaah secara kritis, menilai keandalan informasi, serta mendayagunakannya sebagai bagian dari aktivitas dan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap informasi menunjukkan bahwa kebijakan literasi telah berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas individu.

Dari perspektif implementasi kebijakan, efektivitas ini turut dibentuk oleh keterhubungan empat unsur pelaksanaan, meliputi mekanisme penyampaian informasi, kapasitas pendukung, kecenderungan sikap unsur pelaksana, serta tatanan kelembagaan birokrasi sebagaimana dirumuskan dalam kerangka pemikiran Edward III. Keberhasilan program literasi dalam meningkatkan partisipasi dan layanan menunjukkan bahwa

sebagian besar variabel tersebut telah berjalan dengan cukup baik, meskipun masih terdapat keterbatasan pada aspek sumber daya dan pemerataan akses.

Bukti empiris yang diperoleh dalam kajian ini turut memperlihatkan adanya kesesuaian dengan sejumlah temuan dari kajian sebelumnya yang mengindikasikan bahwa program literasi yang didukung oleh kegiatan yang inovatif, berlandaskan keterlibatan warga secara aktif dan dirancang untuk terus dipertahankan keberlangsungannya terbukti mampu menumbuhkan ketertarikan terhadap aktivitas membaca sekaligus memperluas keikutsertaan masyarakat. Namun, keberhasilan tersebut memiliki keterkaitan yang kuat dengan ketersediaan fasilitas, kapabilitas personel yang menjalankan kegiatan, sekaligus dukungan lingkungan sosial.

Berdasarkan keseluruhan bukti yang diperoleh, aktualisasi agenda penguatan literasi di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dinilai telah menghasilkan capaian yang relatif positif, terutama dalam mendorong ketertarikan warga terhadap aktivitas membaca, memperluas keterlibatan masyarakat, serta membenahi mutu penyelenggaraan layanan kepastakaan. Kendati demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya tersebar secara merata dan masih menunjukkan keberhasilan yang berlangsung pada bagian atau kelompok tertentu saja, sehingga diperlukan upaya lanjutan untuk meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pelaksanaan program literasi di seluruh wilayah.

2. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Strategi Implementasi Kebijakan dalam Meningkatkan Literasi Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah

a) Faktor Pendukung

Penelaahan terhadap bukti empiris berhasil mengidentifikasi sejumlah unsur yang memberikan kontribusi konkret terhadap keterlaksanaan ketetapan penguatan kecakapan literasi pada wilayah Hulu Sungai Tengah diantaranya:

- 1) Komitmen otoritas daerah yang disalurkan melalui institusi pengelola kepastakaan menjadi salah satu unsur penunjang utama, terutama melalui kontribusinya dalam sebagai penggerak utama program literasi. Dukungan ini diwujudkan dalam bentuk pembinaan, pelatihan, penyediaan program, serta koordinasi dengan berbagai pihak. Keterlibatan otoritas pemerintahan tidak berhenti pada penyusunan ketetapan, melainkan turut diwujudkan melalui penyediaan dukungan bagi keberlangsungan kegiatan serta pemantauan terhadap realisasi agenda penguatan literasi.
- 2) Keterlibatan berbagai stakeholder berkedudukan sebagai komponen strategis yang turut menentukan keberhasilan pencapaian sasaran. Sepanjang proses operasionalisasi kebijakan literasi, terdapat sinergi antara pemerintah daerah, sekolah, pustakawan, komunitas literasi, serta duta baca. Keterlibatan sekolah terlihat dari integrasi program literasi dalam kegiatan pembelajaran, sedangkan komunitas literasi dan duta baca berperan dalam memperluas jangkauan program kepada masyarakat. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan literasi tidak bersifat sektoral, melainkan melibatkan berbagai aktor secara aktif.
- 3) Adanya pelatihan dan peningkatan kapasitas pustakawan juga menjadi faktor pendukung yang signifikan. Pustakawan secara rutin mengikuti kegiatan pelatihan, workshop, serta kelompok kerja pustakawan (KKP), dengan sasaran memperkuat kecakapan dalam penatalaksanaan kepastakaan sekaligus penyediaan layanan pengembangan kemampuan literasi. Penguatan kapabilitas tersebut turut mendorong pembenahan mutu layanan, yang tercermin melalui pola interaksi yang semakin komunikatif, munculnya beragam pembaruan, serta mampu menarik minat

baca pengguna.

- 4) Adanya program literasi yang variatif dan inovatif turut mendukung implementasi kebijakan. Program-program seperti kegiatan membaca bersama, read aloud, pojok literasi, lomba literasi, serta kegiatan berbasis kreativitas mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya siswa. Selain itu, agenda penguatan kemampuan masyarakat yang dirancang secara terbuka dengan mengikutsertakan kelompok warga dari beragam latar kehidupan sosial juga memberikan kontribusi dalam memperluas akses literasi.
- 5) Dukungan lingkungan sekolah dan masyarakat juga menjadi faktor pendukung. Sekolah berperan dalam menyediakan ruang dan waktu untuk kegiatan literasi, sedangkan masyarakat mulai menunjukkan partisipasi dalam kegiatan literasi yang dilaksanakan. Hal ini menunjukkan adanya perubahan kesadaran terhadap pentingnya literasi.

Selain itu, dalam perspektif implementasi kebijakan Edward III, faktor pendukung ini mencerminkan terpenuhinya variabel komunikasi (melalui sosialisasi), sumber daya (melalui pelatihan dan dukungan fasilitas), disposisi (melalui komitmen pelaksana), serta struktur birokrasi (melalui koordinasi antar lembaga). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kesiapan sistem pendukungnya. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dan stakeholder dalam program literasi mampu meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan kebijakan. Program literasi yang didukung oleh berbagai pihak terbukti lebih mudah diterima dan memberikan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat.

Dalam mendukung implementasi kebijakan literasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Dinas Perpustakaan tidak hanya berfokus pada penyediaan layanan perpustakaan, tetapi juga melakukan penguatan kualitas pelayanan dan peningkatan partisipasi masyarakat melalui berbagai program literasi. Berdasarkan data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2021 hingga Triwulan I tahun 2025, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan berada pada kategori baik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan perpustakaan telah mampu memberikan manfaat dan kepuasan yang cukup positif bagi masyarakat sebagai pengguna layanan. Selain itu, peningkatan jumlah kunjungan perpustakaan dan keanggotaan perpustakaan dari tahun ke tahun menunjukkan adanya perkembangan minat baca dan keterlibatan masyarakat terhadap kegiatan literasi. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai program literasi, pengembangan layanan perpustakaan, serta kegiatan edukatif yang dilaksanakan telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan budaya literasi masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Didukung nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Tengah periode tahun 2021 hingga Triwulan I tahun 2025 yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan perpustakaan tetap mampu dipertahankan dengan cukup baik dari waktu ke waktu. Selain itu, peningkatan jumlah kunjungan dan keanggotaan perpustakaan menunjukkan bahwa masyarakat semakin aktif memanfaatkan layanan perpustakaan sebagai sarana memperoleh informasi, pengetahuan, dan kegiatan pembelajaran. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perpustakaan telah berkembang menjadi pusat literasi dan pusat aktivitas belajar masyarakat.

Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) per unsur pelayanan Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Triwulan I Tahun 2025, unsur tarif atau biaya memperoleh nilai tertinggi sebesar 4,00 yang menunjukkan bahwa layanan

perpustakaan dinilai sangat terjangkau oleh masyarakat. Selain itu, unsur perilaku pelaksana, kompetensi petugas, prosedur pelayanan, serta produk layanan juga memperoleh penilaian yang baik dari masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perpustakaan telah berjalan cukup optimal dalam mendukung kebutuhan masyarakat terhadap layanan informasi dan literasi. Dengan adanya pelayanan yang baik, masyarakat menjadi lebih aktif dalam memanfaatkan fasilitas perpustakaan dan mengikuti berbagai kegiatan literasi yang diselenggarakan.

Selain melalui pelayanan langsung, implementasi kebijakan literasi juga diperkuat melalui komunikasi tidak langsung dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi dan edukasi literasi. Berdasarkan hasil observasi terhadap akun media sosial resmi Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Tengah seperti Instagram, TikTok, dan Facebook, media sosial dimanfaatkan untuk mempublikasikan kegiatan perpustakaan, promosi layanan, edukasi literasi digital, informasi lomba literasi, kegiatan duta baca, serta berbagai program literasi lainnya. Pemanfaatan media sosial tersebut menunjukkan bahwa Dinas Perpustakaan telah menerapkan strategi komunikasi yang adaptif dan mengikuti perkembangan teknologi informasi. Melalui media sosial, informasi mengenai kegiatan perpustakaan dapat memperluas jangkauan penyampaian informasi kepada warga dalam waktu yang lebih singkat, terutama kelompok usia muda yang memiliki intensitas tinggi dalam memanfaatkan kanal berbasis daring. Atas dasar kondisi tersebut, jejaring sosial dapat ditempatkan sebagai perangkat penunjang strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan literasi dan memperkuat implementasi kebijakan literasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Triwulan I Tahun 2025, diperoleh nilai IKM sebesar 82,79 dengan kategori baik. Survei tersebut melibatkan 291 responden pengguna layanan yang berasal dari variasi jenjang pendidikan maupun bidang mata pencaharian. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa penyelenggaraan layanan perpustakaan telah memenuhi kebutuhan warga pada taraf yang relatif memadai. Apabila ditelaah secara menyeluruh, keadaan tersebut memberikan gambaran bahwa aktualisasi kebijakan literasi di Wilayah Hulu Sungai Tengah telah memperlihatkan capaian yang relatif memadai, tercermin dari pembenahan mutu layanan perpustakaan, diversifikasi kegiatan penguatan kecakapan literasi, perluasan keterlibatan warga, hingga pendayagunaan perangkat digital untuk menyebarluaskan informasi sekaligus menunjang pembelajaran literasi kepada masyarakat.

b) Faktor Penghambat

Penelusuran atas keseluruhan bukti lapangan turut mengungkapkan kondisi lain berupa implementasi kebijakan literasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah masih menghadapi berbagai kendala. Munculnya berbagai kendala dipicu oleh keadaan yang bersumber dari lingkup kelembagaan sekaligus dinamika lingkungan di luar institusi yang memengaruhi jalannya program literasi.

- 1) Salah satu kendala paling menonjol bersumber dari belum terpenuhinya kebutuhan tenaga pelaksana dengan kapasitas yang memadai. Tidak semua perpustakaan memiliki tenaga pustakawan yang profesional, bahkan dalam beberapa kasus pengelolaan perpustakaan masih dirangkap oleh guru. Selain itu, kemampuan pustakawan dalam penguasaan teknologi digital juga masih terbatas, sehingga pengembangan layanan berbasis digital belum optimal.
- 2) Kecukupan pembiayaan masih menjadi persoalan dalam memperluas pelaksanaan berbagai kegiatan peningkatan kecakapan literasi. Kapasitas pendanaan yang belum

memadai mengakibatkan terbatasnya pengadaan fasilitas, koleksi buku, serta kegiatan literasi. Konsekuensi dari keadaan tersebut terlihat pada sejumlah agenda kerja yang pencapaiannya masih belum memenuhi sasaran sebagaimana rancangan awal.

- 3) Sarana dan prasarana perpustakaan yang belum memadai juga menjadi hambatan. Keterbatasan ruang baca, kurangnya perangkat komputer, serta fasilitas yang belum mendukung layanan digital menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas layanan perpustakaan. Kondisi ini juga memengaruhi kenyamanan dan minat masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan.
- 4) Keterbatasan koleksi perpustakaan, baik dari segi jumlah maupun kualitas, juga menjadi faktor penghambat. Koleksi yang belum mutakhir dan kurang sesuai dengan kebutuhan pengguna menyebabkan rendahnya daya tarik perpustakaan. Selain itu, keterbatasan koleksi digital juga menjadi kendala dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi.
- 5) Rendahnya minat baca masyarakat masih menjadi tantangan utama. Meskipun berbagai program literasi telah dilaksanakan, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membaca masih perlu ditingkatkan. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan perilaku masyarakat membutuhkan waktu dan pendekatan yang berkelanjutan.
- 6) Keterbatasan jangkauan layanan literasi. Tidak semua masyarakat dapat mengakses layanan perpustakaan secara optimal, sehingga terjadi ketimpangan dalam pemanfaatan program literasi.

Kondisi ini sesuai dengan teori Mazmanian dan Sabatier (1983) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, karakteristik masalah, serta ketersediaan sumber daya. Keterbatasan fasilitas, sumber daya manusia, dan kondisi sosial masyarakat menunjukkan bahwa kapasitas implementasi kebijakan masih belum optimal.

Selain itu, dalam model Edward III, faktor penghambat ini menunjukkan adanya kelemahan pada variabel sumber daya dan komunikasi, yang berdampak pada efektivitas implementasi kebijakan. Keterbatasan sumber daya menyebabkan program tidak berjalan maksimal, sedangkan rendahnya minat baca menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan belum sepenuhnya efektif dalam mengubah perilaku masyarakat.

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur, kesenjangan kapasitas masyarakat, serta rendahnya partisipasi menjadi hambatan utama dalam implementasi kebijakan literasi. Selain itu, ketimpangan akses dan kurangnya dukungan fasilitas juga menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan program literasi.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan literasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dipengaruhi oleh kombinasi faktor pendukung dan penghambat yang saling berinteraksi. Faktor pendukung seperti dukungan pemerintah, keterlibatan stakeholder, serta program yang inovatif mampu mendorong keberhasilan kebijakan. Namun, faktor penghambat seperti keterbatasan sumber daya, fasilitas, dan rendahnya minat baca masih menjadi tantangan yang memengaruhi optimalisasi pelaksanaan kebijakan literasi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Strategi implementasi kebijakan dalam meningkatkan literasi masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dilaksanakan melalui berbagai program yang terintegrasi, yaitu pembinaan perpustakaan sekolah dan desa, peningkatan kapasitas pustakawan, pengadaan koleksi dan pengembangan layanan perpustakaan, sosialisasi dan

edukasi literasi, kegiatan literasi berbasis inklusi sosial, serta peran duta baca dan kegiatan lomba literasi. Implementasi strategi ini telah mampu mendorong peningkatan minat baca, aktivitas literasi, dan fungsi perpustakaan sebagai pusat pembelajaran, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dalam meningkatkan literasi masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi dukungan pemerintah daerah, keterlibatan stakeholder seperti sekolah dan komunitas literasi, peningkatan kapasitas pustakawan melalui pelatihan, serta adanya program literasi yang inovatif dan variatif. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana yang belum memadai, keterbatasan koleksi perpustakaan, rendahnya minat baca masyarakat, serta belum meratanya akses layanan literasi.

DAFTAR REFERENSI

- Anderson, J. E. (2015). *Public policymaking* (8th ed.). Cengage Learning.
- Bryson, J. M. (2018). *Strategic planning for public and nonprofit organizations* (5th ed.). John Wiley & Sons.
- Cepiku, D., Ferlie, E., & Sicilia, M. (2020). In search of convergence: Reforms in the Italian public sector. *International Review of Administrative Sciences*, 86(2), 257–274. <https://doi.org/10.1177/0020852318757069>
- Elbanna, S., Andrews, R., & Pollanen, R. (2016). Strategic Planning and Implementation Success in Public Service Organizations: Evidence from Canada. *Public Management Review*, 18(7), 1017–1042. <https://doi.org/10.1080/14719037.2015.1051576>
- Grindle, M. S. (2017). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Hill, M., & Hupe, P. (2021). *Implementing public policy* (3rd ed.). Palgrave Macmillan.
- Idrus, S. H. (2025). The role of public policy in improving digital literacy in rural communities. *The Journal of Academic Science*.
- Johnson, G., Scholes, K., & Whittington, R. (2017). *Exploring strategy*. Pearson Education.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Scott, Foresman and Company.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nugroho, R. (2017). *Public policy* (6th ed.). Elex Media Komputindo.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (2014).
- Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (2021). *Strategi nasional literasi masyarakat*. Perpustakaan RI.
- Pierre, J. (2020). *Governance, politics and the state* (2nd ed.). Red Globe Press.
- Rodiyah, I., & Bolanitan, Z. O. (2024). Enhancing Digital Literacy in Village Government for Effective SID Program Implementation. *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 24. <https://doi.org/10.21070/ijppr.v24i0.1335>
- Sedarmayanti. (2017). *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju.
- Stead, J. G., & Stead, W. E. (2019). *Sustainable strategic management* (2nd ed.). Routledge.
- Suharyani, & Tamba, I. W. (2017). Evaluasi program kampung literasi dalam menumbuhkan minat baca masyarakat di Desa Sesela Kecamatan Gunungsari. *Transformasi*, 5(1), 65–76.
- UNESCO. (2017). *Reading the past, writing the future: Fifty years of promoting literacy*. UNESCO Publishing.
- Wahab, S. A. (2016). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara.